

PERUBAHAN STRUKTURAL BEBERAPA NEGARA INDUSTRI DI KAWASAN ASIA-PASIFIK DAN KESEMPATAN BAGI INDONESIA*

J. PANGLAYKIM

PENGANTAR

Menurut beberapa pengamat/analisis ekonomi dan bisnis internasional, dasawarsa 1980-an merupakan "years of turbulence" - tahun-tahun penuh pergolakan pada tingkat internasional, tetapi juga merupakan tahun yang penuh tantangan. Dalam hubungan ini, kami ingin membatasi diri pada pembahasan masalah yang berhubungan dengan bisnis internasional. Hal ini tidak berarti bahwa masalah lain seperti perkembangan politik dunia, hubungan internasional dan sebagainya menjadi kurang penting, tetapi kita akan melihatnya sebagai aspek yang mempengaruhi perkembangan bisnis internasional dan nasional. Di samping itu pembatasan ini pun dimaksudkan untuk melihat pengaruh bisnis internasional terhadap perkembangan bisnis dan industri nasional.

Menurut pengamatan, bisnis internasional pada umumnya dan di kawasan Asia-Pasifik khususnya, sedang menghadapi banyak masalah dan akan memegang peranan yang cukup besar dalam menentukan perubahan pola perdagangan, investasi dan hubungan bisnis Indonesia, ASEAN dan beberapa negara besar lainnya di kawasan Asia-Pasifik. Proses perubahan yang sedang dan diharapkan dapat dilaksanakan adalah penyesuaian struktural ("structural changes"). Masalah perubahan dan penyesuaian struktural akan dilaksanakan minimal oleh dua negara di kawasan Asia-Pasifik dan akan diikuti oleh negara-negara lainnya di kawasan tersebut.

Untuk melengkapi pembahasan perlu diadakan suatu analisa mengenai perkembangan bisnis dan ekonomi internasional yang mengakibatkan timbulnya masalah perubahan struktural yang akan dan harus dihadapi oleh

* Kertas kerja untuk ceramah ILUNI-Universitas Airlangga, 22 Januari 1980, di Fakultas Ekonomi-Universitas Airlangga Surabaya.

negara-negara industri dan bagaimana pengaruhnya pada negara-negara sedang berkembang yang mempunyai dan tidak mempunyai sumber-sumber alam, bahan mentah dan sebagainya.

PERKEMBANGAN SETELAH PERANG DUNIA II: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PESAT

Negara-negara yang mengalami kehancuran selama Perang Dunia II antara lain Jerman Barat dan Jepang, tetapi setelah perang berakhir di Eropa Barat telah dilakukan usaha untuk antara lain membantu membangun perekonomian Jerman Barat secara besar-besaran melalui Marshall Plan. Sedangkan Jepang mendapat bantuan dari Amerika dan adanya "American Umbrella" telah dapat membantu Jepang untuk merehabilitasikan ekonominya serta menunjukkan hasilnya dari negara yang hancur karena perang menjadi salah satu dari empat negara "giant economic power" dalam dunia internasional.

Masa setelah Perang Dunia II sampai permulaan tahun 1970 dapat digolongkan sebagai masa perdagangan bebas (free trade era). Pada masa itu kepemimpinan Amerika dalam bidang militer, politik dan ekonomi/bisnis tampaknya diterima dan keunggulannya masih menonjol dalam bidang-bidang tersebut. Amerika memimpin kerja sama ekonomis/politis dengan Eropa Barat dan Jepang. Hal ini dilihat sebagai suatu stabilitas politik di tingkat internasional. Stabilitas politik, perkembangan perdagangan bebas dan masih utuhnya sistem moneter internasional yang berdasarkan "fixed exchange rate" telah memungkinkan negara-negara seperti Jepang dan Jerman Barat memanfaatkan sebaik-baiknya keadaan yang sangat menguntungkan ini untuk bisnis internasional. Kondisi dunia dan bisnis internasional pada masa itu telah mendorong Jepang merumuskan strategi pembangunan negaranya sehingga dapat mencapai supremasi dalam bidang bisnis dan ekonomi melalui strategi "export-led-economy". Jepang hendak dan sudah mulai membangun perekonomian nasionalnya berdasarkan strategi "export-led" berbeda dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika dan negara-negara Eropa (kecuali mungkin Jerman Barat) yang berdasarkan pada "domestic-demand-led-economy". Pilihan strategi "export-led-economy" antara lain disebabkan karena keadaan alam negara Jepang sendiri yang hampir tidak mempunyai sumber alam dan bahan mentah sedangkan untuk mengembangkan ekonominya, mereka membutuhkan bahan mentah dan sumber alam tersebut, yang dahulu pernah dilakukan dengan mengadakan pendudukan militer. Untuk memperoleh sumber alam dan bahan mentah, mereka dapat melakukan pembelian, pembayaran dan menjamin suplai yang kontinu sehingga dapat di-

jamin kesinambungannya. Untuk membiayai pembelian (impor) bahan mentah dibutuhkan dana yang cukup besar, dan ini hanya dapat diperolehnya melalui ekspor, sehingga ekspor menjadi salah satu sumber utama dari devisa untuk membiayai impornya.

Ditinjau dari sudut perencanaan nasional, kebutuhan akan bahan mentah untuk menggerakkan bisnis dan industri Jepang, dibutuhkan suatu sistem logistik nasional yang efisien dan efektif. Banyak negara lebih cenderung menyerahkan penyelesaian masalah logistik yang sangat penting artinya bagi perekonomian nasional ini pada lembaga-lembaga pemerintahan atau perusahaan negara. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Jepang, karena mereka telah berpengalaman cukup lama dalam usaha pengembangan sektor swasta. Dengan demikian pemerintah Jepang yang berdasarkan pada "administrative guidance" sebagai salah satu bagian dari "national industrial policy" menyerahkan suplai bahan mentahnya pada perusahaan Jepang yang dikenal sebagai "Sogo Soshu" (general trading firms, yang sebelum Perang Dunia II dikenal sebagai Zaibatsu, Keiretsu dan sebagainya). Ternyata strategi "export-led-economy" telah menjadikan Jepang sebagai "Japan Incorporation" yang menciptakan suatu mekanisme kerja sama formal dan informal antara sektor pemerintah/birokrasi, sektor swasta, bisnis, industri dan beberapa pusat kekuatan (seperti LDP, asosiasi dan sebagainya) yang telah menunjukkan keberhasilan yang belum terlihat di negara-negara lain karena dirasakan cukup rumit, kecuali Korea Selatan. Dengan persiapan dan rencana yang matang, setelah Perang Dunia II Jepang telah menggunakan kesempatan dengan baik sehingga pertumbuhannya dapat digolongkan sebagai "high growth economy" dan dalam tahun-tahun terakhir tingkat pertumbuhannya, antara tahun-tahun 1969-1973 adalah rata-rata 10,3%. Perkembangan industri Jepang terpusat pada usaha mempertinggi kapasitas produksi barang-barang hasil industri untuk diekspor ke pasar internasional. Keberhasilan mereka dalam menciptakan suatu kerangka kerja internasional sangat membantu penetrasi mereka di pasar internasional, sehingga banyak negara terutama Amerika dan negara-negara MEE merasakan adanya persaingan untuk industri tertentu di dalam negeri. Sebagai akibat masuknya hasil industri Jepang dan bersaing dengan produk dalam negeri, maka Amerika dan Eropa Barat terpaksa harus mengurangi kapasitas atau bahkan harus menutup kegiatannya. Pengangguran dan "hilang"-nya pasar bagi industri dalam negeri ini telah mendorong berbagai "lobby" dan kekuatan politik dan ekonomi dalam negeri untuk mengadakan berbagai tindakan proteksionistis. Pada tingkat pemerintahan tampak adanya friksi-friksi dalam hubungan antara Jepang-Amerika dan Jepang-MEE. Perundingan-perundingan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang, Amerika dan MEE tidak selalu berjalan lancar, ketegangan dan kata-kata yang kurang diplomatis dilontarkan pada Jepang sehingga timbul penekanan-penekanan terhadap Jepang agar

mengubah sikapnya. Tekanan ini antara lain diarahkan pada pembukaan pasar dalam negeri Jepang untuk barang-barangnya di negara-negara tersebut serta tekanan terhadap impor hasil pertanian yang lebih banyak dan Jepang ditekan untuk mengadakan perubahan struktural. Perubahan struktural ini penting untuk negara-negara yang sedang berkembang.

Setelah tahun 1970-an, dengan adanya berbagai macam "Shokkus" dalam bidang politik, ekonomi, peningkatan harga minyak dan bahan mentah lainnya, serta adanya berbagai macam keengganan menerima hasil industri Jepang telah menimbulkan berbagai bentuk proteksionisme baru seperti OMAS (Organized Marketing Agreements, Organized Free Trade dan sebagainya) dan pengurangan kegiatan ekonomi internasional Jepang, semuanya ini memberi kesan pada kita bahwa Jepang sebenarnya harus mengubah strategi pembangunannya dengan cepat sehingga pertumbuhannya menjadi lebih lambat (*slower growth*), karena diperkirakan dewasa ini pertumbuhan perekonomian Jepang berkisar pada 5,5%. Hilangnya pasar dalam bentuk "free trade" pada akhir tahun 1970-an dan digantinya sistem "fixed exchange rate" dan "floating exchange rate" telah mendorong Jepang untuk mengarahkan strateginya pada "slower growth" dan memikirkan tindakan selanjutnya untuk memperlancar perubahan struktural dalam industrinya. Tampaknya Jepang saat ini sudah memberikan "go ahead" bagi mekanisme pengambilan keputusan untuk merumuskan "blue print" baru agar industri Jepang mengarah pada "intensive knowledge industries". Dengan demikian diharapkan agar industri dapat mengurangi penggunaan energi dan dapat memasuki pasar internasional dengan produk-produk hasil teknologi tinggi. Dengan perkataan lain, proses perubahan struktural diarahkan ke tingkat industri tersier (*service economy*), sehingga dapat diharapkan akan mengurangi tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap mereka karena mereka telah memasuki pasar "intensive knowledge industries".

Di atas telah dibahas tentang Jepang dengan mekanisme pengambilan keputusan yang sulit dan kompleks (menurut pandangan pihak luar) telah merumuskan suatu "blue print" yang mengarah pada perubahan struktural dalam bidang perekonomian sehingga dengan demikian diharapkan dapat turut membantu perkembangan perekonomian dan bisnis internasional. Namun demikian adanya perumusan "blue print" tetap mengharuskan Jepang untuk mempunyai suatu "strategic export" walaupun mungkin tidak didasarkan lagi pada energi yang tinggi tetapi pada "intensive knowledge industries". Menurut kami, hal itu sulit untuk diubah mengingat Jepang "miskin" akan sumber alam dan bahan mentah, tetapi sebaliknya dapat memperbesar kemampuannya menciptakan sumber tenaga manusia yang bersifat inovatif dan kreatif. Dalam hal "government policy guidance" Jepang

tampaknya mempunyai aspek positif dengan merumuskan suatu "blue print" walaupun masih bersifat sementara, namun arahnya sudah jelas yaitu perubahan struktural yang menuju pada "tertier industries". Hendaknya kita melihat hal ini sebagai suatu tindakan yang dapat menguntungkan perekonomian kita, khususnya dalam hubungan interdependensi kita dengan Jepang, karena bila hal ini dapat ditangani dengan baik, maka akan dapat mengubah pola perdagangan dan investasi Indonesia, Jepang dan mungkin "pemain-pemain lain dalam dunia bisnis internasional".

AMERIKA DAN PERUBAHAN STRUKTURAL

Dalam sistem pengambilan keputusan di Amerika banyak pihak harus diperhatikan mengingat banyaknya terdapat golongan yang berbeda-beda kepentingannya seperti dari kalangan bisnis, industri, perbankan, buruh, kongres, pemerintahan, birokrasi dan sebagainya, sehingga sulit untuk menciptakan suatu "blue print" ala Jepang. Di Amerika peranan sektor swasta lebih dominan dibandingkan dengan sektor lain sehingga sulit melakukan pengambilan keputusan seperti yang telah dilakukan di Jepang. Dalam sistem pengambilan keputusan pada tingkat makro di Amerika, tampaknya kurang atau tidak dapat diterima adanya "administrative guidance" seperti yang biasa dilakukan di Jepang.

Perekonomian di Amerika tidak didasarkan pada suatu "blue print" nasional. Setiap perusahaan atau unit industri mempunyai rencana sendiri-sendiri dan mendasari usahanya pada "free enterprise economy", sehingga dalam kenyataannya perekonomian Amerika didasarkan pada ratusan bahkan ribuan rencana perusahaan. Yang dianggap sebagai "koordinator" dari rencana-rencana individual tersebut adalah kekuatan mekanisme pasar dan harga (market and price mechanism). Berhasil atau tidaknya suatu rencana ditentukan oleh mekanisme pasar dan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan perekonomian Amerika sejak beberapa dasawarsa sampai saat ini didasarkan pada "domestic-demand-led-economy". Pasar dalam negeri memberikan kesempatan yang cukup besar pada ribuan perusahaan mengembangkan diri, dan ekspor bagi sebagian besar perusahaan di Amerika bukan merupakan hal yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan.

Sejak beberapa tahun terakhir ini perkembangan MNC Amerika tampaknya mulai menunjukkan kebutuhan untuk mengekspor. Seperti halnya dengan pasar negara-negara industri lainnya, pasar di Amerika sudah mencapai suatu tingkat kejenuhan sehingga mereka harus mencari lokasi-lokasi yang masih dapat digolongkan sebagai "growth areas" agar dapat mengem-

bangkan diri. Oleh sebagian besar MNC Amerika dan Eropa, negara-negara di Asia sudah digolongkan sebagai "growth areas", sehingga dapat diperkirakan mereka akan dan sudah mulai melakukan ekspansi ke negara-negara di kawasan Asia. Dalam perkembangan ekonomi selanjutnya, tampaknya ekspor dan perdagangan luar negeri Amerika mulai memegang peranan penting. Perdagangan luar negeri MNC Amerika yang dahulu terpusat di sebagian besar negara Eropa kini sudah beralih sedangkan perdagangan mereka dengan negara-negara di kawasan Asia,¹ khususnya Jepang, Korea Selatan dan lain-lain sudah mulai melebihi volume perdagangannya dengan negara-negara Eropa. Namun tampaknya pemerintah Amerika belum atau kurang mempunyai kekuatan dan kemauan (tidak mempunyai prioritas tinggi) untuk mengarahkan industri-industri yang dianggap sudah kurang produktif dan tidak memperlihatkan kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan Jepang, atau menutup industri yang dianggap sudah "usang" dan kurang produktif dan mengalihkannya ke industri lain yang lebih produktif, seperti dalam bidang-bidang industri baja, tekstil dan sebagainya. Bahkan dalam sektor-sektor tersebut "lobby"-nya telah berhasil menekan pemerintah Amerika untuk mengadakan berbagai kebijaksanaan membatasi pemasukan barang-barang tersebut dari negara lain. Proteksi terhadap industri yang digolongkan sudah "usang" tampaknya masih berjalan terus. Dengan tindakan ini sebenarnya yang dirugikan adalah konsumen, sedangkan para produsen mempunyai "lobby" yang kuat untuk memberikan proteksi kepada perusahaan yang "usang" di Amerika dengan pretensi kepentingan nasional, karena hal ini akan menciptakan pengangguran.

Walaupun pada prinsipnya Amerika tidak akan kembali pada sistem proteksionisme yang masih mempunyai "hubungan" dengan sistem perdagangan bebas, namun dalam kenyataannya prinsip perdagangan bebas antara Jepang dengan negara berkembang lainnya (newly industrialized nations) telah dilanggar dan kurang dilaksanakan secara konsekuen. Kita melihat bahwa kepentingan nasional akan mendorong para perumus kebijaksanaan untuk memperhatikan perusahaan nasional apabila dianggap mereka berada dalam bahaya. Apabila kita membandingkan antara yang dilakukan oleh Jepang dan yang dilakukan oleh Amerika, maka kita melihat bahwa dari Amerika belum dapat diharapkan terlalu banyak, yaitu perubahan-perubahan struktural industri-industri yang sudah "usang" belum dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti yang telah dilakukan oleh Jepang. Jepang sudah mempunyai suatu "blue print" sebagai arah (direction) sedangkan Amerika masih harus menentukan prioritas dan proses penentuan prioritas ini akan memakan waktu yang cukup lama.

1 Lihat karangan Dr. Hadi Soesastro, "Interdependensi Ekonomi di Asia-Pasifik Dalam Tahun 1980-an", *Analisa*, Oktober 1979.

NEGARA-NEGARA LAIN DI KAWASAN ASIA-PASIFIK

Dalam hubungan ini kita melihat bahwa Korea Selatan dapat digolongkan sebagai "single fighter" yang memperlihatkan keberhasilannya dalam mengembangkan perekonomiannya. Korea Selatan yang pernah mengalami masa "penjajahan" Jepang, mengenal Jepang lebih daripada negara-negara lainnya di kawasan Asia. Tampaknya Korea Selatan memperoleh inspirasi dari keberhasilan Jepang, hal ini tampak apabila kita menelaah strategi yang diambil, sistem dan lembaga yang dibentuk sangat menyerupai sistem yang dilakukan oleh Jepang. Hubungan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan birokrasi serta pembentukan lembaganya merupakan ciri khas dari pelaksanaan sistem "export-led-economy". Korea Selatan meniru Jepang karena mempunyai problem yang sama yaitu tidak mempunyai sumber alam dan bahan mentah. Berdasarkan pelajaran yang diambil dari Jepang dewasa ini Korea Selatan sudah dapat digolongkan sebagai negara yang maju dalam bidang industri (newly industrialized nation). Pelajaran yang dapat kita peroleh dari Korea Selatan adalah antara lain: (i) kerja sama antara sektor-sektor pemerintah, swasta dan birokrasi merupakan hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan; (ii) disiplin kerja, ketekunan dalam melaksanakan tugas-tugas, "commitment" untuk mencapai suatu tingkat keberhasilan, adanya kepemimpinan dalam negara dan politik yang kuat dan stabil (strong leadership), pendidikan tenaga manusia yang sistematis serta menciptakan tenaga pelaksana atau manajer/birokrat yang mempunyai orientasi bisnis dan sebagainya yang dianggap sebagai "tambahan" dari keberhasilan mereka. Peranan yang diambil oleh "general trading companies" Korea Selatan hampir sama dengan yang telah dilakukan di Jepang.

Di samping Korea Selatan kita juga melihat adanya beberapa negara lain di kawasan Asia ini yang berusaha untuk mengikuti model Jepang dan Korea Selatan yang dianggap telah berhasil dengan mengadakan penyesuaian dengan kondisi di negara yang bersangkutan. Yang dianggap sebagai prinsip pokok untuk mencapai keberhasilan adalah pemikiran atau konsep "Incorporation", yaitu kesatuan arah antara sektor pemerintahan/birokrasi, swasta dan sektor-sektor tambahan seperti lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan misalnya "general trading firms", disiplin, sarana, keuangan dan sebagainya. Kita melihat negara-negara seperti Taiwan, Singapura, Thailand (yang baru membentuk lebih dari lima "general trading firms") dan Malaysia (Sime Darby telah beroperasi di 23 negara) dan lain-lain sudah mulai menerapkan model "Incorporation".

NEGARA-NEGARA YANG MENJALANKAN STRATEGI "EXPORT-LED-ECONOMY"

Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang mempunyai strategi "export-led-economy" seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, akan menghadapi masalah perubahan struktural karena mereka tidak mempunyai sumber alam yang besar. Mereka harus mengimpor energi dan sebagian besar dari industrinya bersifat "energy based". Mereka akan dan harus mengadakan perubahan struktural ke arah industri yang bersifat "intensive knowledge industries" dari "energy intensive industries". Keharusan untuk mengubah industri secara struktural ini akan berpengaruh cukup baik dan menguntungkan negara-negara yang mempunyai "resource-based" yang kuat, seperti Indonesia dan Malaysia.

POLA YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

Dalam perkembangan dasawarsa 1980-an kita melihat penggolongan industri dalam "intensive energy based" atau "raw material based" seperti petrochemicals, pulp and paper dan sebagainya yang lambat laun akan mengalami re-lokasi. Pabrik-pabrik tersebut di atas tidak akan menguntungkan lagi apabila dilokasikan di pusat konsumsi seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi harus dipindahkan ke negara-negara yang menjadi sumber energi. Dalam hal itu, Indonesia mempunyai kedudukan yang cukup kuat, sehingga diperkirakan dalam tahun-tahun mendatang kecenderungan ini akan tampak di Indonesia. Apabila re-lokasi ini terjadi, maka hal ini akan sangat menguntungkan Indonesia, karenanya harus dipersiapkan program kerja jauh sebelumnya. Persiapan program kerja ini tidak hanya dalam pengertian teknis saja, tetapi yang lebih penting adalah orientasi bisnisnya yang disertai dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan, komersial, penelitian, pendidikan dan sebagainya yang sesuai dengan perkembangan yang diperkirakan. Apabila re-lokasi telah merupakan kenyataan maka dapat diperkirakan bahwa arus investasi akan lebih banyak mengalir ke daerah-daerah seperti Indonesia. Investasi semacam ini akan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara. Secara tradisional kita melihat usaha MNC Jepang yang menyodorkan kepada kita suatu bentuk yang dikenal sebagai "package deal", jadi mereka memberikan secara lengkap termasuk lembaga manajemen, teknologi, modal dan kekuatan mereka di pasar internasional. Mungkin hal ini merupakan suatu alternatif bagi proyek-proyek tertentu yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar, tetapi apabila kita melihat alternatif lain seperti yang telah dilakukan di Korea Selatan dan Jepang, maka yang kita perlukan adalah investasi dalam bentuk modal dengan suatu "technical

agreement" yang maksimal. Kita dapat menyewa, membeli dan melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan teknologi, manajemen dan sebagainya, sehingga kesempatan ini dapat digunakan untuk memperkuat kedudukan perusahaan nasional kita, baik swasta maupun milik negara. Namun demikian dalam alternatif ini kita juga harus waspada karena apabila kita menjual barang dalam bentuk bahan mentah untuk industri dibutuhkan suatu lembaga seperti "general trading firms" yang memiliki kerangka kerja yang luas dan hal ini membutuhkan persiapan yang baik. Dalam bidang ini mungkin kita dapat memikirkan suatu "joint company agreement" untuk distribusi di pasar internasional sambil membentuk suatu "core general trading firms" yang bertugas untuk menciptakan kerangka kerja internasional tersebut. Aspek ini tidak mudah, tetapi apabila kita tidak memulainya, kapan kita dapat mencapai kedewasaan dalam bidang ini? Korea Selatan pun ketika mulai melaksanakan konsep ini digolongkan sebagai "new comer", tetapi akhirnya mereka berhasil mencapai tingkat tersebut.

Dengan terwujudnya re-lokasi dan pelaksanaan pabrik-pabrik yang membuat bahan-bahan mentah industri, dan bahkan mungkin berlangsung sampai tingkat "processed", pola perdagangan antara Jepang dan negara-negara lain termasuk Indonesia akan mengalami perubahan. Kita akan mengurangi impor bahan mentah industri dari Jepang atau negara industri lainnya. Hal ini turut membantu kita dalam usaha mengurangi ketergantungan pada suplai bahan mentah industri, di samping untuk membantu dan mengoreksi kepentingan di dalam struktur industri nasional dan melaksanakan kebijaksanaan industri yang diarahkan pada penciptaan kaitan yang banyak baik inter maupun intra dalam struktur industri sehingga dengan demikian dilaksanakan "backward/forward linkages" yang pada saat ini sangat kurang.

Kesempatan yang terbuka dengan adanya perubahan dalam pola perdagangan dan investasi akan memberi kemungkinan besar kepada negara yang sedang berkembang untuk membentuk MNC nasional (yang pemilikannya diarahkan pada "public ownership" atau perusahaan negara). Kita sudah melihat perkembangan MNC di negara-negara yang sedang berkembang seperti Sime Darby, dan sebagainya (lihat buku kami *Emerging Enterprises in the Asia-Pacific Region*, 1979, CSIS). Perkembangan MNC yang berakar dan berpusat di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia hendaknya dilihat sebagai suatu kesempatan yang harus dipikirkan secara mendalam, karena dalam kesempatan ini kita bukan hanya dapat mengembangkan sektor industri saja tetapi juga akan mendorong perkembangan sektor kegiatan lainnya seperti perbankan, asuransi, pengangkutan, konsultasi, dan sebagainya. Pemain-pemain dan lembaga-lembaga baru akan memasuki kegiatan-kegiatan tersebut. Hubungan dan kerja sama akan lebih intensif, erat, tetapi lebih kompleks. Manajer dan pelaksana baru akan turut

serta dalam pembentukan era yang lebih kompleks, modern, "sophisticated" dan lebih pragmatis.

Proses perkembangan yang telah diutarakan yaitu mengenai perubahan-perubahan dalam pola perdagangan, investasi (menarik investasi jangka panjang dan bukan hanya menarik MNC sebagai "package deal"), serta kesempatan timbulnya MNC yang berasal dan berpusat di negara-negara berkembang yang dapat turut membantu mengurangi ketergantungan kepada "the giant economic powers" di kawasan Asia-Pasifik, dapat membantu mencegah menajamnya ketegangan di antara mereka, serta memberikan arti yang lebih mendalam pada konsep dan kenyataan mengenai interdependensi bisnis serta ekonomi internasional. Memanfaatkan kesempatan yang akan timbul sebagai akibat dari proses/perubahan struktural yang akan terlaksana dalam dasawarsa 1980-an terletak di tangan kita sendiri. Dapatkah kita memanfaatkan kesempatan tersebut dalam dasawarsa yang akan datang? Tantangan-tantangan dan jawabannya berada di dalam tangan kita sendiri.